



Lahan Pertanian Masuk Heritage

Wali Kota-Dandim Sepakati Kerja Sama

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan Kodim 0734/Jogja membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam penerapan kawasan heritage bidang pertanian. Ke depan, kawasan itu harus benar-benar dijaga keberadaannya, mengingat memiliki nilai tradisi dan sejarah.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, tidak hanya

bentuk bangunan atau lokasi yang masuk dalam bagian heritage. Ke depan, lahan pertanian juga diupayakan masuk dalam kategori itu. Hal itu untuk mensikapi keterbatasan lahan di Kota Jogja.

"Tak hanya bangunan atau lokasi, (nanti) lahan pertanian juga diupayakan masuk dalam kawasan heritage," kata HS usai menghadiri penandatanganan MoU di Kodim 0734/Jogja kemarin (6/3).

Gagasan itu cukup beralasan, mengingat lahan pertanian di Kota Jogja sangat terbatas. Jika tidak

produktif. Kami lakukan agar lahan yang ada di sana, tidak beralih menjadi bangunan atau pemukiman," ujarnya.

Dengan wacana itu, HS menyambut baik kesepakatan yang dibentuk dengan Kodim 0734/Jogja. Dengan perjanjian semacam itu, memberikan wujud kedaulatan pangan menuju swasembada pangan nasional.

"Jika tak ada langkah konkret, harga beras akan naik terus. Kami paham, di Kota Jogja bukan lumbung pertanian, sebab tanahnya sempit. Dan itu yang harus disikapi dengan matang," tandas HS.

Perjanjian kerja sama bernomor 32/PERJ.YK/2015 tersebut, mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan peningkatan produksi

ada kebijakan mengenai hal ini, praktis ke depan, berpotensi hilangnya lahan pertanian di Kota Jogja. Dan itu bisa menimbulkan persoalan ketahanan pangan.

Jika upaya itu bisa terealisasi, Pemkot Jogja bersedia memberikan intensif berupa pengurangan besaran pajak di dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setidaknya sudah ada beberapa area persawahan yang potensial masuk menjadi kawasan heritage.

"Seperti di Tegalrejo, Kotagede, dan Umbulharjo, itu sawah-sawah

tanaman pangan di wilayah Kota Jogja dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Terdiri 10 pasal, jangka waktu perjanjian selama 3 tahun dan dapat diperbarui.

Komandan Kodim 0734/Jogja Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga menambahkan, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan KASAD yang menjalin MoU dengan Kementerian Pertanian. Peran TNI sangat dibutuhkan terutama dalam pendampingan kepada petani, sekaligus mengawasi distribusi pupuk.

"Ini sebagai tindak lanjut. Bapak KASAD sebelumnya sudah menjalin MoU dengan kementerian pertanian soal ini," kata Renal. (fid/jko/ga)



MENUJU HARITAGE PERTANIAN: Dandim Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga disaksikan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti saat menandatangani kesepakatan kerja sama di Makodim 0734/Jogja kemarin (6/3).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005